

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Jl. Johari I No. 8, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta 12240

Tel: (021) 726 2908 E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •

Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •

Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •

Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan mana pun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 1, Nomor 2, Januari - Juni 2009

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Cuplikan dari Wirid Ibn 'Arabi	5-6
Senang Jadi Siswa	7-8
Pengantar	9-12

SAJIAN KHUSUS

Mewujudkan Masyarakat Madani di Era Reformasi <i>Nurcholish Madjid</i>	15-30
Nurcholish Madjid dan Akar Religius "Masyarakat Warga" <i>F. Budi Hardiman</i>	31-51
Masyarakat Madani: Bingkai Keadaban bagi Masyarakat Indonesia yang Demokratis-Pluralistik <i>Syamsul Arifin</i>	53-71

ARTIKEL

Sistem Khilafah dalam Tradisi Islam <i>Ahmad Syafii Maarif</i>	75-87
Islam dan Tantangan Demokratisasi di Indonesia: Persoalan Definisi dan Pelembagaan <i>Masdar Hilmy</i>	89-106

DAFTAR ISI

Memaknai Keindonesiaan dalam Perspektif Politik Keragaman <i>Airlangga Pribadi</i>	107-125
Aliran-aliran Islam Kontemporer <i>Kautsar Azhari Noer</i>	127-151
Mencoba Menangkap Ruh al-Qur'an <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	153-176
Eksplorasi ke Dunia Fisik: Risiko-risiko dan Solusinya <i>Andy Setiawan</i>	177-183
Tuhan adalah Kedamaian <i>Baba Hari Daas</i>	185-188

RESENSI BUKU

Islam Radikal: Mengubur Hidup-hidup Demokrasi <i>Okky Tirtoadhissoerjo</i>	191-195
-------------------------------------------------------------------------------	---------

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	199-200
Ucapan Terima Kasih	201

MASYARAKAT MADANI

Bingkai Keadaban bagi Masyarakat Indonesia yang Demokratis-Pluralistik

Syamsul Arifin

Pada 1999, Paramadina menerbitkan buku Greg Barton dalam versi Indonesia dengan judul, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib dan Abdurrahman Wahid 1968-1980*. Semula, buku ini merupakan tesis doktor Greg Barton di Monash University, Australia, yang berjudul, *The Emergence of Neo-Modernism: A Progressive, Liberal Movement of Islamic Thought in Indonesia [A Textual Study Examining the Writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, and Abdurrahman Wahid 1968-1980]*. Dengan penelitian yang kemudian dipublikasikan secara luas ini, Greg Barton ingin memberikan perhatian terhadap Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid, yang telah memainkan peran signifikan dalam pengembangan intelektualisme baru setidaknya di kalangan Islam di Indonesia. Tentu saja, di luar nama-nama yang diteliti oleh Greg Barton sebenarnya masih banyak nama-nama lain yang menarik perhatian peneliti sebelum Greg Barton. Sebut, misalnya, penelitian yang dilakukan Fachry Ali dan Bahtiar Effendy untuk karya mereka *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru* (1986). Selain nama-nama yang telah disebut oleh Greg Barton, Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, menyebut M. Dawam Rahardjo, M. Amin Rais, Kuntowijoyo, Jalaluddin Rakhmat, Ahmad Syafii Maarif,

Adi Sasono, AM Saefuddin, Endang Saifuddin Anshari, dan M. Imaduddin Abdurrahim. Masing-masing intelektual Muslim tersebut oleh Fachry Ali dan Bahtiar Effendy dikelompokkan ke dalam empat tipologi pemikiran, yaitu: neo-modernisme, sosialisme-demokrasi, internasionalisme-universalisme, dan modernisme Islam.

Di antara nama-nama intelektual tersebut, baik yang disebut oleh Greg Barton maupun Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, Nurcholish Madjid patut memperoleh perhatian khusus. Kendati telah wafat beberapa tahun yang lalu, banyak kalangan yang tetap memperbaungkan pemikiran Nurcholish Madjid. Sebagai intelektual Muslim yang lama mengenyam pendidikan Islam, baik di pesantren maupun di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) — kini Universitas Islam Indonesia (UIN), tentu hal yang wajar jika pemikiran Nurcholish Madjid memiliki bingkai tradisi keilmuan Islam yang kokoh. Kekuatannya dan daya tarik pemikiran Nurcholish Madjid antara lain karena bingkai tersebut. Tetapi karena Nurcholish Madjid memiliki pengalaman sebagai aktivis dan tokoh penting pada sebuah organisasi kemahasiswaan modernis, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), apalagi belakangan melanjutkan studi di University of Chicago di Amerika Serikat, pemikiran Nurcholish Madjid memiliki spektrum yang lebih luas. Perhatian Nurcholish Madjid tidak hanya tertuju pada persoalan-persoalan keislaman, melainkan juga pada persoalan-persoalan keindonesiaan dan kemodernan. Di beberapa forum dan tulisan, ketika membicarakan Islam, Nurcholish Madjid selalu mengaitkannya dengan masalah keindonesiaan dan kemodernan. Begitu juga sebaliknya, ketika membicarakan keindonesiaan dan kemodernan, Nurcholish Madjid selalu mengaitkan keduanya dengan Islam. Maka pada diri Nurcholish Madjid seperti terdapat dialektika antara keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Dialektika ini antara lain terlihat secara nyata pada saat Nurcholish Madjid membicarakan konsep masyarakat madani sebagai elaborasi dari konsep masyarakat Madinah.

Di mana letak dialektika antara keislaman di satu pihak dan keindonesiaan dan kemodernan di pihak lain pada gagasan masyarakat madani? Pada salah satu artikelnya yang berjudul “Mewu-

judikan Masyarakat Madani di Era Reformasi,” yang menjadi artikel utama dalam Jurnal *Titik-Temu* edisi ini (Januari – Juni 2009), pertama-tama Nurcholish Madjid menegaskan bahwa masyarakat madani berakar pada konsep masyarakat Madinah di zaman Nabi. Dengan mengutip Martin Lings, bagi Nurcholish Madjid, masyarakat Madinah merupakan solusi Ilahi paling akhir bagi persoalan pemerintahan (*The most recent of Providence's solutions to the problem of government*) serta merupakan konsep idaman, teladan, dan pedoman bagi masyarakat sekarang. Sebagai konsep idaman, teladan, dan pedoman, jelas Nurcholish Madjid lebih lanjut, konsep masyarakat Madinah sudah selayaknya dipertimbangkan mengingat adanya kesamaan karakter antara bangsa Indonesia dengan masyarakat Madinah, yakni kemajemukan. Sebagai upaya mencari relevansi dan sekaligus kontekstualisasi dengan persoalan keindonesian, Nurcholish Madjid memilih istilah masyarakat madani yang sepadan dengan *civil society* daripada masyarakat Madinah sehingga relatif bisa diterima oleh bangsa Indonesia yang pluralistik.

Genealogi dan Persoalan Peristilahan

Sebelum membicarakan gagasan masyarakat madani dari Nurcholish Madjid, ada baiknya terlebih dahulu melakukan sedikit analisis genealogis terhadap konsep *civil society*. Analisis ini perlu dilakukan kendati tidak terlalu mendalam karena menyeruaknya perbincangan tentang masyarakat madani di kalangan Islam Indonesia dan terutama kalangan intelektualnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh dominasi *civil society* setidaknya di tingkat wacana. Sebelum masyarakat madani muncul ke permukaan, para aktivis demokrasi di Indonesia lebih akrab dengan konsep *civil society*. Konsep ini dinilai lebih tepat dijadikan sebagai *cover term* bagi komunitas yang mengembangkan wacana dan gerakan demokrasi di Indonesia. Baru setelah konsep masyarakat madani mendapatkan penguatan dari beberapa intelektual Muslim, *civil society* mengalami

proses domestikasi secara konseptual. Banyak kalangan di Indonesia mulai akrab dengan konsep masyarakat madani, atau setidaknya menyebut *civil society* secara berbarengan dengan masyarakat madani. Padahal jika dirunut ke belakang, antara masyarakat madani dan *civil society* memiliki akar sejarah dan sosial yang berbeda. *Civil society* berakar pada sejarah masyarakat Barat, sementara masyarakat madani dekat dengan Islam.

Sedikit melakukan analisis sejarah, orang yang sering disebut-sebut memperkenalkan istilah *civil society* adalah Cicero yang hidup antara tahun 106-43 SM. Sebenarnya Cicero tidak menggunakan istilah *civil society*, tapi *societes civilis*. Pada zaman Cicero ini, *civil society* disamakan dengan masyarakat politik (*political society*), yakni masyarakat yang memiliki kode hukum sebagai dasar pengaturan hidup. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi evolusi pemikiran tentang konsep *civil society*. Dalam tradisi Eropa sampai abad ke-18, pengertian *civil society* dianggap sama dengan pengertian negara (*state*), yakni suatu kelompok/kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok lain. Baru pada paruh kedua abad ke-18, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan *civil society* kemudian dimengerti orang sebagai dua entitas yang berbeda, sejalan dengan proses pembentukan sosial (*social formation*) dan perubahan-perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (*enlightenment*) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut.

Mengiringi proses evolusi itu, terjadi perbedaan dan pertentangan antara para ilmuwan dan filsuf. Jika coba dipilah, diskursus tentang *civil society* pada zaman modern terpola pada tiga pandangan. Pandangan pertama adalah pandangan liberalsime-radikal yang lebih menekankan aspek kemandirian masyarakat dan perbedaan posisinya sedemikian rupa, sehingga menjadi antitesis dari *state*. Pandangan pertama rupanya lebih mementingkan masyarakat (*society*). Pandangan ini memperoleh kritik tajam dari Hegel yang kemudian didukung oleh Marx. Hegel mempunyai pandangan pesimistik bahkan nihilistik tentang *civil society*. Menurut Hegel,

civil society merupakan wilayah kehidupan orang-orang yang telah meninggalkan pesan kuat keluarga dan masuk ke dalam kehidupan ekonomi yang kompetitif. Menurut Hegel, ini adalah arena di mana kebutuhan-kebutuhan tertentu atau khusus dan berbagai kepentingan perseorangan bersaing, yang menyebabkan perpecahan-perpecahan sehingga *civil society* itu mengandung potensi besar untuk menghancurkan dirinya. Dengan watak sosial semacam itu, Hegel kemudian menekankan pentingnya supervisi dan kontrol negara, karena, menurut Hegel, kebebasan mengembangkan aspirasi dan kepentingan yang berbeda, yang menjadi karakter *civil society*, adalah sesuatu yang menciptakan kerawanan kepada kohesi masyarakat.

Pandangan berikutnya adalah pandangan yang memosisikan *civil society* sebagai *intermediary entity, standing between the private and the state*.¹ Pandangan ini diwakili oleh Alexis de Tocqueville yang mendefinisikan *civil society* sebagai:

Wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan berdirikan, antara lain kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self-generating*), keswadayaan (*self-supporting*), kemandirian tinggi berhadapan dengan negara, dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diakui oleh warganya.²

Pengertian dari de Tocqueville di atas sejinya dengan pengertian yang dirumuskan Larry Diamond: “*civil society is the realm of organized social life that is voluntary, self-generating, self-supporting, autonomous from the state, and bound by a legal order or set of shared rules.*”³

¹ Larry Diamond, “Civil Society and the Development of Democracy,” *Journal of Democracy* 5/3 (July 1994): 4. Lihat juga John A. Hall, “In Search of Civil Society,” dalam John A. Hall, ed., *Civil Society: Theory, History, Comparison* (Cambridge: Blackwell Publishers, 1995), h. 2.

² Muhammad AS Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 3.

³ Diamond, “Civil Society,” h. 4.

Lalu bagaimana pengertian *civil society* di Indonesia? Berikut ini penting mencoba merekonstruksikan kembali pandangan kalangan intelektual Indonesia seputar pengertian *civil society*. Saparina Sadli yang memilih istilah masyarakat madani memberikan rumusan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang mengembangkan dan menetapkan pola hidup sosial politik-budaya dengan pranata kepemimpinan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental masyarakat (atau yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia). Masyarakat madani adalah suatu masyarakat atau gerakan-gerakan dan kelompok dalam masyarakat yang menghendaki perubahan dari kondisi yang tidak manusiawi (karena kebutuhan fisik dan non fisik tidak terpenuhi) menjadi kondisi hidup yang manusiawi (dengan tatanan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan fisik dan mentalnya sebagai manusia yang beradab).⁴

Sementara itu, Affan Gaffar, pakar politik dari UGM, mencukupkan pengertian *civil society* yang tengah dirumuskan oleh Nicos Mouzelis, yakni: “*all social group and institution which, in conditions of modernity, lie between the primordial kinship group and institutions on the other.*”⁵ Meskipun Affan Gaffar tidak merumuskan pengertian *civil society*, ia merumuskan komponen penting bagi pembentukan *civil society* yang meliputi empat hal utama, yaitu (1) otonomi, (2) akses masyarakat terhadap lembaga negara, (3) arena publik yang bersifat otonom, dan (4) arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat.⁶

⁴ Saparinah Sadli, “Beberapa Catatan tentang Masyarakat Madani,” Makalah Seminar Penjelajah Trace II, Universitas Indonesia, 25 Maret 1998, h. 1.

⁵ Affan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 178.

⁶ Gaffar, *Politik Indonesia*, h. 178.

M. Ryaas Rasyid yang menggunakan istilah masyarakat kewargaan sebagai versi bahasa Indonesia dari *civil society* memberi rumusan bahwa yang dimaksud dengan *civil society* atau masyarakat kewargaan merupakan konsep tentang keberadaan masyarakat yang mandiri dan dalam batas-batas tertentu mampu memadukan dirinya sendiri serta cenderung membatasi intervensi negara ke dalam realitas yang telah diciptakan sebagai ruang kegiatannya.⁷ Tetapi tidak semua pakar politik di Indonesia merasa nyaman dengan upaya pengalihan konsep *civil society* ke dalam bahasa Indonesia. Ramlan Surbakti, pakar politik dari Universitas Airlangga, Surabaya, bahkan merasa kesulitan dalam memberi pengertian terhadap konsep *civil society*. Menurut Ramlan Surbakti, *civil society* merupakan konsep yang masih diperdebatkan (*contested concept*). Sebagaimana Affan Gaffar, Ramlan Surbakti tidak memberikan pengertian *civil society*, tetapi lebih mementingkan pada esensi dari *civil society* yang ia rujuk dari pemikiran Jurgen Habermas yang merumuskan dua kondisi esensial bagi pembentukan *civil society*. Pertama, kebebasan memperbincangkan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama sebagai bangsa (wacana publik), seperti menyatakan pendapat, mengartikulasikan kepentingan, melakukan proses memilih dan mengganti pengurus, dan bebas dari perlakuan semena-mena. Kedua, tersedianya lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kampus, forum-forum komunikasi, dan tempat-tempat pertemuan umum dalam jumlah yang memadai dan berfungsi otonomi (ruang publik). Dalam ruang publik yang bebas dan otonomlah para individu bertindak sebagai *political persons* untuk memperbincangkan dan melaksanakan apa yang telah disepakati bersama sebagai kepentingan bersama.⁸

⁷ M. Ryaas Rasyid, "Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan," *Jurnal Ilmu Politik* 17 (1997): 3.

⁸ Ramlan Surbakti, "Ditsospol dan Pembentukan *Civil Society*," dalam I. Bambang Susilo, ed., *Masyarakat & Negara: Kado untuk Prof. Soetandyo Wignjo-soebroto* (Surabaya: Airlangga University Press, 1997), h. 54.

Yang menarik adalah respons intelektual Muslim Indonesia. Kendati memiliki akar sejarah dan sosial berbeda, banyak intelektual Muslim kita yang cenderung memilih istilah masyarakat madani sebagai padanan *civil society*. Muslim di Indonesia patut berterima kasih kepada Anwar Ibrahim, mantan orang kepercayaan Mahatir Muhammad, yang memperkenalkan konsep masyarakat madani dalam Festival Istiqlal 1995. Pilihan Anwar Ibrahim segera mendapat respons positif dari beberapa intelektual Muslim Indonesia. Secara harfiah, masyarakat madani berarti masyarakat kota, yang umumnya telah terbentuk dengan peradaban maju. Dalam istilah aslinya, *civil* berasal dari bahasa Latin, *civitas dei* atau kota Ilahi. Dari kata ini, kemudian muncul istilah *civilization*, peradaban. M. Dawam Rahardjo, juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, terjemahan masyarakat madani untuk *civil society* adalah “kebetulan yang tepat.” Kata M. Dawam Rahardjo lebih lanjut:

Dalam perspektif Islam, masyarakat madani lebih mengacu pada penciptaan peradaban. Kata *al-dīn* yang umumnya diterjemahkan sebagai agama, berkaitan dengan makna *al-tamaddun* atau peradab. Keduanya mengacu ke dalam pengertian *al-madinah* (*mufrad*) atau *al-madā'in* (*jamak*) artinya kota. Hanya saja, dalam al-Qur'an, pengertian kota tidak hanya diwakili oleh satu kota. Kata *al-qaryah* dan *al-balad*, juga berarti kota, walaupun keduanya sering diartikan sebagai negeri. Tetapi, dalam perkataan negara itu pun terkandung pengertian peradaban dan kebudayaan. Karena dalam perkataan negeri terdapat pengertian tentang suatu daerah yang dihuni manusia. Di situ ada manusia, di situ pula ada peradaban dan kebudayaan.⁹

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES & LASF, 1999), h. 146.

Bahtiar Effendy menguatkan pernyataan M. Dawam Rahardjo. Pada salah satu publikasinya, Bahtiar Effendy, dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tersebut mengatakan:

Dipandang dari sudut peristilahan, kata “masyarakat madani” jelas mempunyai kedekatan makna dengan istilah asalnya, yaitu *“civil society.”* Hal ini merupakan suatu kenyataan yang menarik, mengingat sebelumnya istilah *“civil society”* diterjemahkan secara kurang pas “masyarakat warga.” Bahkan ada yang secara salah kaprah menerjemahkan atau memahami sebagai “masyarakat sipil.” Memang, dari sudut kata-kata, ini merupakan terjemahan harfiah atau verbal yang dapat dibenarkan. Akan tetapi, kesalah-kaprahan itu justru muncul dari pemahaman yang dikembangkan oleh sementara orang, dalam jumlah yang banyak, bahwa *“civil society”* atau “masyarakat sipil” itu lawan dari segala sesuatu yang berbau “tentara” atau “militer.” Ada kemungkinan kesalah-kaprahan itu juga didukung oleh pandangan bipolar yang selama ini muncul di antara kita, yaitu penghadapan yang tidak pas antara “sipil” dan “militer.” Apa saja yang disebut dengan menggunakan kata “sipil” pasti berlawanan atau setidak-tidaknya bersifat bukan ”militer.”¹⁰

Tetapi memang tidak semua intelektual Muslim menerima secara bulat pembedaan *civil society* dengan masyarakat madani. Muhammad AS Hikam yang pernah melakukan kajian mendalam terhadap *civil society* adalah salah seorang yang berkeberatan terhadap pembedaan tersebut. Dalam pandangannya, pengalih-bahasaan *civil society* menjadi masyarakat madani, bisa mengarah pada pembentukan visi yang partikularistik, karena konsep masyarakat madani lebih mengedepankan Islam sebagai *dominant ideology*,

¹⁰ Bahtiar Effendy, “Wawasan al-Qur'an tentang Masyarakat Madani: Menuju Terbentuknya Negara-Bangsa yang Modern,” *Paramadina* 1/2 (1999): 76-77.

Islam sebagai satu-satunya landasan *values system*. Padahal, menurutnya, Islam hanyalah salah satu bagian dari sekian banyak *values system*. Dalam konteks diskursus *civil society*, Muhammad AS Hikam rupanya kurang apresiatif terhadap upaya mencari alternatif yang Islami, karena

Cara-cara seperti itu justru tidak produktif. Upaya menggantikan visi *civil society* dengan model masyarakat seperti yang ada pada zaman Nabi jelas akan menghalangi kemungkinan kita melakukan pencangkokan produk-produk *enlightenment*. Dengan kata lain, tekanannya adalah pada kemampuan kita melakukan pencangkokan-pencangkokan tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing pihak. Dan ini, dalam pandangan orang yang melihat sisi Islam saja, tentu kurang memuaskan. Tetapi, bagi saya, dengan cara itu kita lebih bisa berbicara dengan orang lain dalam lingkup dan cakupan yang lebih luas menyangkut *civil society*.¹¹

Nurcholish Madjid dan Gagasan Masyarakat Madani

Kendati menuai kritik seperti dikemukakan oleh Muhammad AS Hikam di atas, konsep masyarakat madani terus bergulir, alih-alih sekedar sebagai pemadanan dari *civil society*, tetapi lebih mendasar lagi ditawarkan sebagai sebuah model ideal bagi masyarakat Indonesia. Pemikiran seperti ini dengan gigih dikembangkan antara lain oleh Nurcholish Madjid. Dalam pandangan Nurcholish Madjid, meskipun konsep masyarakat madani berakar pada sejarah Islam, yakni masyarakat Madinah, tetapi konsep ini bisa dijadikan model oleh masyarakat Indonesia. Jika Muhammad AS Hikam

¹¹ Muhammad AS Hikam, "Nahdlatul Ulama, Civil Society, dan Proyek Pencerahan," dalam Ahmad Baso, ed., *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hi-dayah, 1999), h. 11.

khawatir terhadap munculnya sikap eksklusif pada diri umat Islam apabila masyarakat madani “dipaksakan” sebagai alternatif *civil society*, Nurcholish Madjid justru menemukan sisi universalitas pada masyarakat madani karena di dalamnya terkandung nilai-nilai keadaban (*civility*) yang sejalan dengan semangat *civil society* dalam zaman modern.

Di Indonesia Nurcholish Madjid bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali memberikan analisis kebahasaan secara menarik serta dasar-dasar teologis dan historis yang cukup mendalam. Kita kutip pernyataannya:

Sebagai kaum Muslim, penting bagi kita merenungi sebuah cita-cita untuk ikut serta ambil peran dalam usaha bersama bangsa kita untuk mewujudkan masyarakat berperadaban, masyarakat madani, *civil society*, di negeri kita tercinta Republik Indonesia, karena terbentuknya masyarakat madani adalah bagian mutlak dari wujud cita-cita kenegaraan, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adalah Nabi Muhammad, Rasulullah *saw*, sendiri yang memberi teladan kepada umat manusia ke arah pembentukan masyarakat berperadaban. Setelah belasan tahun berjuang di kota Makkah tanpa hasil yang selalu menggembirakan Allah memberikan petunjuk untuk hijrah ke Yatsrib, kota *wahah* atau oase yang subur sekitar 400 km sebelah utara Makkah. Kemudian, setelah mapan dalam kota hijrah itu, beliau ganti nama Yatsrib menjadi al-Madinah, artinya “kota.”

Secara konvensional, perkataan Madinah memang diartikan sebagai kota. Tetapi secara ilmu kebahasaan, perkataan itu mengandung makna peradaban. Dalam bahasa Arab, peradaban memang dinyatakan dalam kata-kata *madaniyyah* atau *tamaddun*, selain dalam kata-kata *hadlārah*. Karena itu tindakan Nabi *saw* mengubah nama Yatsrib menjadi Madinah pada hikmatnya adalah sebuah pernyataan niat, atau proklamasi, bahwa beliau bersama para pendukung beliau yang terdiri dari kaum

Muhajirin dan Anshar hendak mendirikan dan membangun masyarakat yang beradab.¹²

Menurut Nurcholish Madjid, tugas utama yang dilakukan oleh Rasulullah *saw* selama sepuluh tahun di Madinah adalah membangun masyarakat yang beradab, yaitu

... masyarakat yang adil, terbuka dan demokratis, dengan landasan takwa kepada Allah dan taat kepada ajaran-Nya. Takwa kepada Allah dalam arti semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dalam peristilahan kitab suci juga disebut semangat *rabbaniyah* atau *ribbiyah*. Inilah *habl-un min-a'Llāh*, tali hubungan dengan Allah, dimensi vertikal hidup manusia, salah satu jaminan untuk manusia agar tidak jatuh hina dan nista.

Semangat *rabbaniyah* itu, jika cukup tulus dan sejati, akan memancar dalam semangat pri-kemanusiaan, yaitu semangat *insāniyah* atau *basyariyah*, dimensi horisontal hidup manusia, *habl-un min-a al-nās*. Kemudian pada urutannya, semangat peri kemanusiaan itu sendiri memancar dalam berbagai bentuk hubungan pergaulan bersama manusia yang penuh budi luhur... Masyarakat berbudi luhur atau berakhhlak mulia itulah masyarakat berperadaban, masyarakat madani, *civil society*.¹³

Dengan mempertimbangkan dimensi transendental, etis, dan sosial dari masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah *saw* itu, Nurcholish Madjid lalu merekomendasikan agar dijadikan teladan dan rujukan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Menurutnya, hal tersebut merupakan hal yang mendesak bagi bangsa Indonesia mengingat akhir-akhir ini banyak tersingkap perilaku yang menunjukkan tiadanya ke-

¹² Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 163-164.

¹³ Madjid, *Cita-cita Politik Islam*, h. 167-168.

sejatian dan ketulusan dalam mewujudkan nilai-nilai madani. Nurcholish Madjid memberi contoh dalam masalah pluralisme. Menurut penilaiananya, dalam hal pluralisme, masyarakat Indonesia masih menunjukkan pemahaman yang dangkal dan kurang sejati. Meskipun istilah pluralisme, dikatakan lebih lanjut, sudah menjadi barang harian dalam wacana umum nasional kita, masih ada tanda-tanda bahwa orang memahami pluralisme hanya sepintas lalu, tanpa makna yang mendalam, tanpa berakar pada ajaran kebenaran. Menurut Nurcholish Madjid:

Paham kemajemukan masyarakat atau pluralisme tidak cukup hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yang majemuk, tapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai bernilai positif, merupakan rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran silang budaya yang beraneka ragam. Pluralisme merupakan pendorong pengayaan budaya bangsa. Maka budaya Indonesia, atau keindonesiaan, tidak lain adalah interaksi yang kaya (*resourceful*) yang dinamis antara perilaku budaya yang beraneka ragam itu dalam suatu *melting pot* yang efektif seperti diperankan oleh kota-kota besar Indonesia, khususnya Ibukota Jakarta Raya sendiri.

Jadi pluralisme tidak dapat dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama, yang justru menggambarkan kesan fragmental, bukan pluralisme. Pluralisme juga tidak boleh sekedar dipahami sebagai kebaikan negatif (*negative good*) yang ditilik dari kegunaannya untuk menyingkirkan fanatisme (*to keep fanaticism at bay*). Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities wihtin the bonds of civility*). Bahkan pluralisme adalah juga suatu keharusan bagi kesela-

matan umat manusia, antara lain melalui mekanisme pengawasan dan pengimbangan yang dihasilkannya.¹⁴

Di samping dangkalnya pemahaman terhadap pluralisme, Nurcholish Madjid juga mengungkap persoalan yang sama terhadap toleransi. Padahal, menurut Nurcholish Madjid, toleransi merupakan prinsip utama dalam masyarakat madani, seperti dikatakan berikut ini:

Ada banyak indikasi bahwa masyarakat memahaminya hanya sepiantas, sehingga toleransi menjadi seperti tidak lebih dari pada persoalan prosedural, persoalan tatacara pergaulanan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda. Padahal persoalan toleransi adalah persoalan prinsip, tidak sekedar prosedur. Toleransi adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tatacara pergaulanan yang enak antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hal itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan suatu ajaran yang benar. Hikmah dan manfaat itu adalah sekunder lainnya sedangkan yang primer ialah ajaran yang benar itu sendiri. Maka sebagai yang primer, toleransi harus kita laksanakan dan wujudkan dalam masyarakat, sekalipun untuk kelompok tertentu – bisa untuk kita sendiri pelaksanaan toleransi secara konsekuensi itu mungkin tidak menghasilkan sesuatu yang enak.¹⁵

Dalam menjelaskan tentang pluralisme dan toleransi, Nurcholish Madjid mendasarkan diri pada sejumlah ayat dan hadits, di antaranya sebagai berikut ini:

¹⁴ Nurcholish Madjid, “Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan,” dalam Ahmad Baso, ed., *Civil Society Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), h. 23-24.

¹⁵ Madjid, “Masayarakat Madani,” h. 24.

- (1) Dan bagi tiap-tiap umat ada arah yang ia menghadap kepada-Nya. Maka berpacula kamu dalam berbagai kebaikan. Di mana saja berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas sesuatu (Q, 2:148);
- (2) Untuk setiap umat di antara kamu, Kami telah berikan aturan dan jalan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya kamu Dia jadikan umat yang tunggal. Tetapi Dia hendak menguji kamu berkenaan dengan apa yang Dia anugerahkan kepada kamu. Maka berpaculah kamu sekalian untuk berbagai kebaikan. Kepada Allah kembalimu semua, kemudian Dia akan jelaskan kepadamu segala hal yang kamu pernah berselisih di dalamnya itu (Q, 5:48);
- (3) Seandainya Tuhan menghendaki, tentu beriman semua orang di bumi, seluruhnya! Maka apakah engkau (hai Muhammad) akan memaksa manusia agar beriman semua! (Q, 10:99);
- (4) Tidak ada paksaan dalam agama sesungguhnya jalan hidup yang benar telah jelas berbeda dengan jalan hidup yang sesat (Q, 2:256);
- (5) Ibn Abbas menuturkan bahwa Nabi *saw* ditanya: “Agama mana yang paling dicintai oleh Allah?” Nabi menjawab, “Semangat kebenaran yang toleran (*al-hanafiyah al-samhah*).¹⁶

Bingkai Keadaban Masyarakat Demokratis-Pluralistik: Memperkuat Pendidikan

Nurcholish Madjid sama sekali tidak bicara bentuk formal masyarakat yang dikembangkan oleh Nabi yang dikenal dengan masyarakat Madinah, melainkan lebih menukik pada aspek yang lebih fundamental dan universal, yakni keadaban. Salah satu keadaban yang mendapat perhatian serius dari Nurcholish Madjid

¹⁶ Madjid, “Masayarakat Madani,” h. 27-28.

adalah penghargaan terhadap kemajemukan atau pluralisme. Pluralisme, menurut Nurcholish Madjid, merupakan pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban (*genuine engagement of diversities within the bonds of civility*). Bagi Nurcholish Madjid, pluralisme tidak perlu dipandang sebagai paham yang perlu ditolak karena baik dalam doktrin maupun sejarah, Islam memberikan penghargaan terhadap kemajemukan dan persamaan.

Pemikiran Nurcholish Madjid yang lebih menekankan pada aspek keadaban tersebut, mengingatkan penulis pada konsep Robert W. Hefner¹⁷ tentang demokrasi berkeadaban (*democratic civility*), yakni partisipasi demokratis yang di dasarkan pada nilai-nilai toleransi dan persamaan. Aspek keadaban yang memperoleh perhatian Nurcholish Madjid memiliki relevansi dengan perkembangan kontemporer Indonesia pasca runtuhan Orde Baru. Pasca runtuhan rezim Orde Baru, meskipun di satu sisi, masyarakat mulai menuai kebebasan, tapi di sisi lain, perilaku politik primitif juga masih menguat yang dapat dijadikan indikasi terjadinya kevakuman keadaban berdemokrasi seperti terjadinya fragmentasi, konflik dan praktik kekerasan yang terjadi tidak saja di kalangan masyarakat bawah, tetapi sayangnya, juga berkecambah di kalangan elite kita.

Kevakuman keberadaan berdemokrasi disebabkan oleh intitusi sosial yang ada di masyarakat kita, tidak begitu menghiraukan urgensi pendidikan demokrasi. Padahal, demokrasi tidak tumbuh hanya dengan mengandalkan proses alami. Demokrasi, seperti ditegaskan oleh Azyumardi Azra¹⁸, bukanlah barang jadi tetapi ia harus dipelajari (*democracy is learned*) dan dipraktikan secara berkesinambungan. Cara yang paling strategis untuk mengalami dan memberdayakan demokrasi, menurut mantan rektor UIN Jakarta

¹⁷ Robert W. Hefner, *Democratic Civility: The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal* (New Brunswick, New Jersey: Transaction Publisher, 1998).

¹⁸ Azyumardi Azra, *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat* (Jakarta: Buku Kompas, 2002), h. 3-13. Lihat juga Azyumardi Azra, *Paradigma Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Buku Kompas, 2002), h. 147-170.

ini, adalah melalui apa yang disebut *democracy education*. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi dan implementasi konsep, nilai, budaya, dan praktik demokrasi melalui pendidikan.

Orientasi terpenting dari pendidikan demokrasi adalah terinternalisasinya budaya politik demokrasi sebagai variabel utama dalam mewujudkan *smart and good citizen*. Menurut Larry Diamond¹⁹ inti budaya politik utama adalah keyakinan, sikap, nilai-nilai, ide-ide, sentimen dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik suatu negeri dan peran dari masing-masing individu dalam sistem itu. Dalam studi yang dilakukan Harry Eckstein budaya politik itu selanjutnya ditempatkan sebagai referensi tindakan politik seseorang. Dengan kata lain, tindakan politik seseorang dipengaruhi oleh budaya politik yang dimilikinya. Harry Eckstein²⁰ membagi tiga tipe seseorang yang dipengaruhi oleh budaya politik, yaitu: orientasi kognitif (*cognitive orientation*) yang meliputi pengetahuan dan keyakinan-keyanikan tentang sistem politik; orientasi afektif (*affective orientation*) yang terdiri dari perasaan-perasaan mengenai sistem politik; dan orientasi evaluasi (*evaluational orientation*) yang meliputi komitmen pada nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik dengan menggunakan informasi dan perasaan.

Tentu saja, sebagaimana di kemukakan oleh Azyumardi Azra di atas, budaya politik demokrasi tersebut bukanlah barang jadi yang dapat hadir dan berwujud melalui pewarisan begitu saja (*taken for granted*), tetapi ia harus dipelajari (*democracy is learned*). Dalam konteks ini, institusi pendidikan Islam memiliki tanggung jawab moral mengembangkan pendidikan demokrasi. Ada pendapat menarik dari pendapat Robert W. Hefner bahwa munculnya *civil*

¹⁹ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation*, edisi Indonesia, ed. Mefi Hermawanti, at al (Yogyakarta: IRE Press, 2003), h. 207.

²⁰ Harry Eckstein, "A Culturalist Theory of Political Change," *American Political Science Review* 83/3 (September 1988):791. Lihat juga Yun-han Chu, et.al., *Regime Performance, Value Change and Authoritarian, Detachment in East Asia* (Taipe: Asian Barometer Project Office, National Taiwan University and Academia Sinicia, 2003), h. 6.

Islam tidak bisa dilepaskan dari peran serta intitusi pendidikan Islam. Pada titik inilah apresiasi perlu diberikan kepada Nurcholish Madjid karena tidak mengabaikan peran pendidikan sebagai media pembelajaran demokrasi yang berkeadaban. Nurcholish Madjid merupakan pendiri yayasan dan lembaga pendidikan tinggi yang bernama Paramadina. Lembaga ini merupakan investasi berjangka panjang yang dapat diorientasikan pada pengembangan budaya demokrasi yang berkeadaban (*democratic civility*).❖

Daftar Kepustakaan

- Ali, Fachry, dan Bahtiar Effendy. *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pendekatan Islam Indonesia Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1986.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Agama dan Negara: Merajut Kerukunan Antarumat*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Diamond, Larry. "Civil Society and the Development of Democracy." *Journal of Democracy* 5/3 (July 1994).
- Diamond, Larry. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Yogyakarta: Iref Press, 2003.
- Eckstein, Harry. "A Culturalist Theory of Political Change." *American Political Science Review* 83/3 (September 1988).
- Effendy, Bahtiar. "Wawasan al-Qur'an tentang Masyarakat Madani: Menuju Terbentuknya Negara-Bangsa yang Modern." *Paramadina* 1/2 (1999): 76-87.
- Gaffar, Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hall, John A. "In Search of Civil Society." Dalam John A. Hall, ed., *Civil Society: Theory, History, Comparison*. Cambridge: Blackwell Publishers, 1995.
- Han Chu,Yun, et.al. *Regime Performance, Value Change and Authoritarian Detachment in East Asia*. Taipei: Asian Barometer Project Office, National Taiwan University and Academia Sinicia, 2003, h. 6.
- Hefner, Robert W. *Democratic Civility: The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Publisher, 1998.

- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Hikam, Muhammad AS. "Nahdlatul Ulama, Civil Society, dan Proyek Pencerahan." Dalam Ahmad Baso. *Civil Sociey Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Madjid, Nurcholish. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Madjid, Nurcholish. "Masyarakat Madani dan Investasi Demokrasi: Tantangan dan Kemungkinan." Dalam Ahmad Baso, *Civil Sociey Versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Madjid, Nurcholish. "Membangun Rumah Demokrasi" *Republika*. 20 Maret 1999.
- Mahasin, Aswab. "Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah." Kata Pengantar untuk Ernest Gellner. *Masyarakat Sipil: Prasyarat Menuju Kebebasan*. Bandung: Mizan, 1995.
- Rahardjo, M. Dawam. "Masyarakat Madani." Makalah Training Pemberdayaan Masyarakat Madani (*Civil Society*), Kerja Sama LSAF dengan Program Pasca-sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 12-13 Desember 1998.
- Rahardjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES & LASF, 1999.
- Rahardjo, M. Dawam. "Masyarakat Madani di Indonesia: Sebuah Penjajakan Awal." *Paramadina 1/2* (1999): 7-32.
- Rasyid, M. Ryaas. "Perkembangan Pemikiran tentang Masyarakat Kewargaan." *Jurnal Ilmu Politik* 17 (1997).
- Sadli, Saparinah. "Beberapa Catatan tentang Masyarakat Madani." Makalah Seminar Penjelajah Trace II, Universitas Indonesia, 25 Maret 1998.
- Surbakti, Ramlan. "Ditsospol dan Pembentukan Civil Society." Dalam I. Bambang Susilo, ed. *Masyarakat & Negara: Kado untuk Prof. Soetandyo Wignjosoebroto*. Surabaya: Airlangga University Press, 1997.

Syamsul Arifin adalah Kepala Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur.